

Keluarga dan Proses Demokratisasi

SALAH satu pernyataan yang dikeluarkan oleh *The World NGO Forum* di Malta (*Malta Statement*) dalam menyambut Tahun Keluarga Internasional 1994, adalah ingin memperkokoh kembali kedudukan keluarga sebagai unit yang fundamental dari masyarakat. Kestabilan institusi keluarga, disebutkan sebagai agen utama dalam pembangunan berkesinambungan, di mana keberhasilan pembangunan tergantung dari kematangan sosial, emosional, spiritual, politik dan budaya dari para anggota keluarga.

Pernyataan tersebut nampaknya tidak selaras dengan prediksi John Naisbitt dalam *Megatrend 2000*, bahwa penutupan abad ini akan ditandai oleh kesadaran yang lebih besar akan eksistensi individu, yaitu individu (bukan keluarga) sebagai fondasi masyarakat dan sebagai agen perubahan. Kemampuan individu dalam menciptakan *material wealth* dalam sistem kapitalisme liberal telah terbukti, apalagi dengan runtuhnya sistem komunisme.

Gema penonjolan eksistensi individu, nampaknya juga terdengar semakin kuat di Indonesia. Hal ini ditandai munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengecilkan arti keluarga. Dalam rangka 'melancarkan proses demokratisasi individu', struktur keluarga yang ada sekarang dianggap sebagai kendala. *Malta Statement* justru menganggap keberhasilan proses demokratisasi ini sangat tergantung dari kekuatan institusi keluarga.

Polemik antara Ariel Heryanto (*Keluarga dan Negara*, Kompas 30 April 1994) dan Th. Sumartana (*Perubahan Masyarakat dan Kesucian Keluarga*, Kompas 10 Mei 1994), menarik untuk disimak, dan merupakan contoh dari paradoks antara *Malta Statement* dan gerakan yang ingin mengecilkan arti keluarga. Ariel yang bersikap skeptis pada kemampuan keluarga dalam mendidik dan membentuk individu yang demokratis telah, bak meniru judul buku David Cooper, *The Death of Family*, memproklaimkan 'kematian keluarga'. Ia memberikan beberapa contoh dari desakralisasi institusi keluarga. Sebelum orang sempat bergabung karena menanggapi 'ajal'nya keluarga, tulisan Sumartana ternyata memberikan harapan bahwa keluarga masih 'hidup'.

Jerat-jerat desakralisasi

Adanya desakralisasi keluarga oleh Ariel dikatakan bukan disebabkan oleh terjadinya dekadensi moral masyarakat, tetapi sebagai konsekuensi logis dari perubahan sosial. Dalam kerangka bebas nilai, pernyataan tersebut mungkin betul. Tetapi terlalu gegabah kalau diterangkan dalam konteks negara kita. Elemen yang paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat adalah berlakunya standar normatif, baik yang ditentukan oleh agama maupun

kultur masyarakat setempat. Bukankah terjadinya desakralisasi keluarga justru karena masyarakat sudah tidak lagi mempunyai standar nilai? Penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang tadinya dianggap 'memalukan', menjadi hal yang biasa seperti keluarga tanpa nikah, *free sex*, remaja punya anak, dan lebih ekstrim lagi pasangan homo dan lesbi, adalah beberapa contoh dari runtuhnya standar nilai masyarakat.

Kaum liberal beranggapan bahwa standar nilai yang diberlakukan pada masyarakat adalah salah satu bentuk dari dogmatisme dan tirani. Karena standar nilai bagaimanapun juga merupakan aturan-aturan yang membatasi gerak hidup individu. Segala bentuk pembatasan adalah bertentangan dengan konsep liberalisme yang mengandalkan kekuatan *reason* dan *observation* manusia. Oleh karena itu adanya sekularisme, *moral nihilism*, dan segala bentuk desakralisasi, adalah konsekuensi logis dari diterimanya pemahaman liberal.

Apa implikasi dari *moral nihilism* ini? Pernyataan Nietzsche *God is dead* diganti oleh Eric Fromm dengan *Man is dead*. Menurut Fromm manusia moderen telah 'tamat' kemanusiaannya menjadi semata-mata 'benda hidup', karena terlalu mencintai keduniaan. Manusia yang telah bebas dari kungkungan nilai menjadi begitu terabsorpsi dengan dirinya sendiri (*extreme individualism*). Ini justru membawa manusia kepada rasa disorientasi dan kesepian, serta *longing to believe*. Manusia yang demikian akan berusaha *Escape from Freedom*, kata Fromm.

Menurut David Riesman dalam bukunya *The Lonely Crowd*, mereka cenderung lebih konformis, oleh karena itu mudah terjebak pada ideologi-ideologi yang paling totaliter sekalipun. Hal ini dapat menerangkan mengapa banyak orang di AS misalnya, mudah terjebak ke dalam *cult* atau gerakan-gerakan spiritual yang ekstrem dan opresif.

Richard Sennet dalam *The Fall of Public Man* juga menggambarkan hal serupa. Kebebasan individu tanpa dilandasi oleh nilai yang berakar kuat, telah membuat individu ingin menarik diri dari kehidupan publik. Rendahnya persentase masyarakat AS yang ikut dalam pemilu, adalah salah satu gejalanya. Perempuan bebas ternyata mengalami apa yang disebut Colette Dowling sebagai *Cinderella Complex*. Yaitu kaum wanita profesional yang ingin kembali kepada indahnya perlindungan dan ketergantungan pada sang pangeran.

Di sini terlihat bahwa individualisasi yang mengarah pada *moral nihilism* telah membuat manusia kehilangan pegangan dan siap untuk menyerahkan dirinya pada kekuasaan di luar dirinya, yang akhirnya justru menghambat proses demokrasi itu sendiri. Kalau demikian hal-

nya, bagaimana mewujudkan demokrasi? Peter Berger ber-teori bahwa agar demokrasi bisa terwujud, maka diperlukan individu-individu yang mempunyai karakter kuat, yaitu karakter yang seimbang, matang, percaya diri dan terbuka. Bagaimana pun di mana karakter tersebut diwujudkan?

Keluarga kokoh, tiang demokrasi

Aristoteles mengakui pentingnya keluarga sebagai mediator yang efektif untuk mengantar manusia ke gerbang masyarakat yang kompleks. Perbedaan manusia dengan binatang adalah, binatang bisa hidup cukup dengan *instinct*-nya. Sedangkan manusia memerlukan institusi untuk membentuknya.

Urie Bronfenbrenner menekankan pentingnya keutuhan dan kestabilan keluarga. Menu-rutnya *"Only strong family could shape strong characters."* Para psikolog tentunya dengan yakin dapat menerangkan betapa pentingnya kestabilan keluarga dalam membentuk karakter individu.

Mengapa institusi keluarga sekarang labil, dan tidak efektif lagi dalam menjalankan fungsinya? Sering dikatakan karena adanya proses industrialisasi dan urbanisasi. Pernyataan tersebut mungkin tepat kalau kita melihat apa yang terjadi di Barat. Tetapi untuk kasus Jepang dan Korea misalnya, proses industrialisasi secara umum tidak hanya berpengaruh terhadap keutuhan keluarga. Hubungan di dalam keluarga masih bercorak tradisional dengan jenjang hirarkinya.

Sumartana menyalahkan kaum bapak yang tidak mau menerima gerakan emansipatoris, baik dari istri maupun anaknya, yang mengakibatkan melemahnya institusi keluarga. Tampaknya Sumartana kurang yakin dengan pendapatnya sendiri. Ia ingin mensakralkan institusi keluarga, tetapi di lain pihak menuduh keluarga sebagai sumber eksploitasi karena ada jenjang hirarkis dari Tuhan, pria, wanita sampai anak-anaknya.

Pengertian eksploitasi ini sebetulnya relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dalam kerangka yang bebas nilai seseorang dapat mempertanyakan, untuk apa seorang ibu mau berkorban untuk anaknya, atau seorang bapak memeras keringatnya hanya untuk kelangsungan hidup segelintir manusia di bawah atap rumahnya, atau seorang anak mengasuh orangtuanya yang sudah lansia? Bukankah semuanya itu merupakan bentuk dari eksploitasi? Kekuatan apa yang dapat mendorong manusia untuk melakukan itu semua?

Semua itu tidak bisa dijawab, kecuali kita membawa kerangka nilai. Hanya keterikatan pada nilai-nilai moral atau agama yang dapat mendorong manusia untuk mau berkorban untuk orang lain. Kalau demikian halnya, dapatkah kita mengatakan, seorang istri yang menyiapkan hidangan untuk seluruh anggota keluarganya tereksploitasi, sementara dia sendiri mendapat kebahagiaan hakiki dari pengorbanannya? Suatu pemaksaan konsep eksploitasi pada kerangka berpikir yang berbeda, adalah tindakan yang eksploitatif juga.

Keluarga yang berlandaskan moral, atau suatu kepercayaan yang berakar kuat, akan dapat mengikat para anggota keluarganya, karena masing-masing individu mempunyai *common values* sebagai acuan. Oleh karena itu melemahnya institusi keluarga, adalah disebabkan oleh emansipasi individu yang menjurus pada tercabutnya akar moral, agama, atau budaya. Kehidupan manusia menjadi terfragmentasi dan dapat membawa pada anarkisme dan perpecahan. Landasan moral adalah instrumen keseimbangan utama antara hak dan kewajiban individu, serta kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Kaidah moral adalah sumber inspirasi dan sekaligus alat mekanisme kontrol dari tindakan manusia. Hal ini mutlak diperlukan, agar manusia mempunyai *'sense of rootedness'* sehingga tidak mudah terjerat oleh perangkap *moral nihilism*.

Keluarga yang dilandasi oleh nilai moral hakiki akan lebih mampu untuk mencari titik keseimbangan, sehingga akan lebih stabil, dan kokoh. Di tempat seperti inilah generasi penerus bisa tumbuh tanpa mengalami gangguan emosional, dapat belajar dengan tenang, dan dapat menjadi insan yang berakarakter. Ini semua adalah bekal untuk menjadi demokrat sejati. Seorang demokrat yang selalu menjunjung tinggi nilai moral.

* **Ratna Megawangi**, alumnus Tufts University, dosen GMSK-IPB.